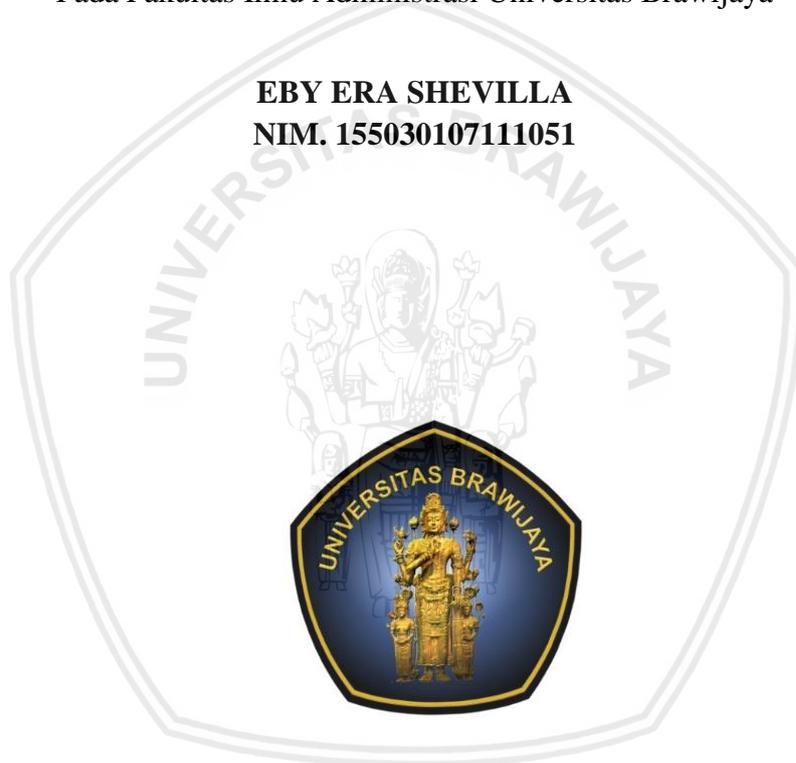


**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA
MELALUI *E-VILLAGE BUDGETING*
(Studi Pada Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**EBY ERA SHEVILLA
NIM. 155030107111051**



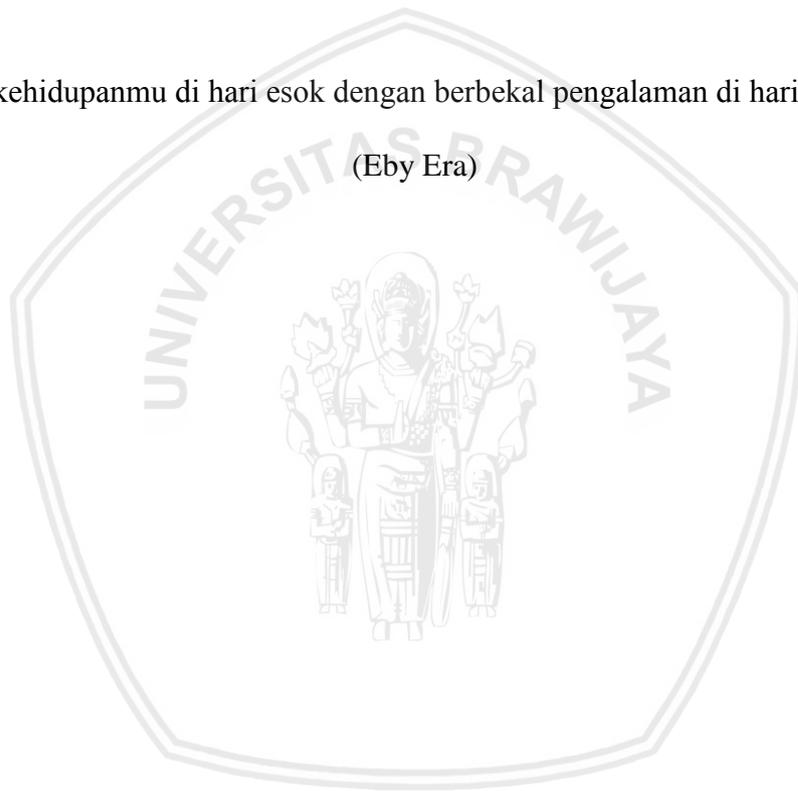
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**

MOTTO

“Seorang yang optimistis adalah pemuda yang terburu-buru, karena ia merasa bahwa janjinya sudah sampai waktunya dan ia sedang ditunggu.” (Kusaini)

“Jalani kehidupanmu di hari esok dengan berbekal pengalaman di hari kemarin.”

(Eby Era)



ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa Melalui *E-Village Budgeting*”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 19 Juni 2019



Eby Era Shevilla

NIM. 155030107111051

RINGKASAN

Eby Era Shevilla, 2019, **Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa Melalui *E-Village Budgeting* (Studi Pada Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)**, Dosen Pembimbing (1) Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, (2) Andy Kurniawan, S.AP., M.AP.

Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, baik asal usul desa, dan adat istiadat. Pada tahun 2015, pengalokasian dana desa Pemerintah Pusat sebesar 59.8 triliun, telah di transfer kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan banyaknya anggaran yang didapat akan memicu banyak terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan anggaran. Maka sejak Tahun 2015 telah diresmikan sistem penganggaran Pemerintah Desa berintegrasi dan jaringan alias *online* di Kabupaten Banyuwangi yaitu *E-Village Budgeting*. Salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan sistem *E-Village Budgeting* adalah Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu 1. Pengelolaan Dana Desa melalui *E-Village Budgeting* di Desa Sukojadi 2. Pengawasan Dana Desa melalui *E-Village Budgeting* di Desa Sukojadi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan diolah melalui cara kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem *E-Village Budgeting* yang diterapkan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuwangi telah mempermudah dalam melakukan proses pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Sukojadi. Karena didalam sistem *E-Village Budgeting* telah memenuhi dalam setiap proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang menjadi salah satu fasilitator *E-Village Budgeting*, harus lebih meningkatkan evaluasi sistem. Untuk Pemerintah Desa juga harus meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

Kata Kunci : *E-Village Budgeting*, Pengelolaan Dana Desa, Kabupaten Banyuwangi

SUMMARY

Eby Era Shevilla, 2019, **Management and Supervision of Village Funds Through *E-Village Budgeting* (Study in Sukojadi Village Blimbingsari Sub-district Banyuwangi Regency)**, Advisors (1) Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, (2) Andy Kurniawan, S.AP., M.AP.

The Government of Village has the authority to manage its own area. Based on Act No. 6 year of 2014 about Villages in article 18 explains that villages are given authority which covers of implementation of village government, implementation of village development, development of village community, and empowerment of village community based on community initiatives, in both of village origins, and customs. In 2015, the allocation of Central Government village funds of 59.8 trillion had been transferred to all Regency Governments and all villages in Banyuwangi Regency. With the large amount of budget obtained will trigger a lot of misuse of the budget. Thus, since 2015 the budgeting system of the Village Government had integrated and networked, aka online in Banyuwangi Regency, that was *E-Village Budgeting*. One of the villages in Banyuwangi Regency that applies the *E-Village Budgeting* system is Sukojadi Village, Blimbingsari Sub-District, Banyuwangi Regency.

The research type used in this study was descriptive research with qualitative approach and limited by two research focuses, they were 1. Management of Village Funds through *E-Village Budgeting* in Sukojadi Village 2. Supervision of Village Funds through *E-Village Budgeting* in Sukojadi Village. This study used data collection technique through interview, observation and documentation. Data that had been obtained would be processed by data condensation, data presentation and conclusion.

Thus study obtained result that *E-Village Budgeting* system that had been applied by Village Government in Banyuwangi Regency had simplified the process of managing and supervising village funds in Sukojadi Village. Because *E-Village Budgeting* system had fulfilled every process of implementation of village fund management, starting from planning, management and administration, until reporting and responsibility. Village Community Empowerment Agency, which was one of *E-Village Budgeting* facilitators, should further improve system evaluation. The Village Government should also increase Transparency and Responsibility to the community and Regency Government.

Keywords: *E-Village Budgeting*, Management of Village Funds, Banyuwangi Regency

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dimana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa Melalui *E-Village Budgeting* (Studi Pada Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)”**.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kesabarannya

untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Andy Kurniawan, S.AP., M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan menyempatkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Seluruh narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, seluruh narasumber dari Kantor Balai Desa Sukojati, serta beberapa masyarakat di Desa Sukojati yang telah membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
8. Untuk kedua orang tua, Ibu Wiwik Romelah dan Bapak Kusaini yang telah memberikan dukungan baik secara materi serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi tercapainya kesuksesan anaknya, karena setiap lantunan nasehat dan doa yang dipanjatkan adalah sebuah semangat dan kekuatan bagi saya.
9. Untuk kakak saya yaitu Angga Williantino dan adik saya Elsa Meyrlinna serta keluarga besar yang telah memberikan semangat maupun dukungan dan juga doa.

10. Semua pihak yang terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai penyusunan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan suatu karya yang terbaik. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini serta penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Malang, 19 Juni 2019

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Halaan Depan Sistem Aplikasi <i>E-Village Budgeting</i>	35
2	Analisis Data Model Interaktif.....	45
3	Tampak Depan Kantor Kepala Desa Sukojadi	52
4	Peta Desa Sukojadi	56
5	Musrenbang Desa Sukojadi	62
6	Daftar Hadir Musrenbang Desa Sukojadi	63
7	Susunan Acara Pada Musrenbangdes Membahas Tentang RKPDesa.....	64
8	Alur Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Menggunakan <i>E-Village Budgeting</i>	69
9	Penjelasan Pak Ahmad Mengenai Pelaksanaan Dana Desa.....	77
10	Banner Transparansi APBDesa 2018 Desa Sukojadi	78
11	Berita Acara Musrenbangdes/Rapat dengan warga desa.....	81
12	Foto Musrenbangdes/Rapat dengan warga desa	82



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Administrasi Publik	10
1. Definisi Administrasi Publik.....	10
2. Fungsi Administrasi Publik.....	11
B. Pemerintah Daerah.....	12
1. Definisi Pemerintah Daerah	12
2. Peran Pemerintah Daerah	13
C. Pemerintah Desa dan Otonomi Desa	14
1. Komsep Otonomi Desa	14
2. Institusi/Kelembagaan Desa.....	16
3. Pemerintah Desa.....	16
D. Manajemen Keuangan Publik.....	18
1. Manajemen Keuangan Publik	18
2. Fungsi Manajemen Keuangan Publik.....	20
3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Publik.....	21
4. Keuangan Desa	22
5. Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan Desa	23
E. Pengawasan.....	24
1. Pengertian Pengawasan	24
2. Tujuan Pengawasan	25



3. Asas-Asas Pengawasan.....	26
4. Jenis Pengawasan	28
5. Proses Pengawasan	30
F. <i>Elektronic Government</i>	31
1. Definisi <i>E-Government</i>	31
2. Prinsip-Prinsip <i>E-Government</i>	32
3. Elemen Sukses <i>E-Government</i>	33
G. <i>E-Village Budgeting</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Analisis Data.....	44
H. Uji Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Kabupaten Banyuwangi	48
2. Desa Sukojadi.....	52
B. Penyajian Data	61
1. Pengelolaan Dana Desa Melalui <i>E-Village Budgeting</i> di Desa Sukojadi.....	61
2. Pengawasan Dana Desa Melalui <i>E-Village Budgeting</i> di Desa Sukojadi.....	76
C. Analisis dan Pembahasan.....	87
1. Pengelolaan Dana Desa Melalui <i>E-Village Budgeting</i> di Desa Sukojadi.....	88
2. Pengawasan Dana Desa Melalui <i>E-Village Budgeting</i> di Desa Sukojadi.....	97
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN	112

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	112
2	Dokumentasi Peneliti	115
3	Laporan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018	118



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk dari Tahun ke Tahun.....	49
2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2017	49
3	Pertumbuhan Ekonomi (Jatim/Nasional)	51
4	Jumlah Pengangguran Desa Sukojati	57
5	Jumlah Keluarga Sejahtera Desa Sukojati	57
6	Perangkat Desa dan Jabatan	58
7	Penganggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2018 Desa Sukojati...	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia salah satu negara yang menganut asas desentralisasi, yang berarti sebagian kewenangan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kebijakan Desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberi keleluasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dalam wujud otonomi daerah. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini salah satu manfaatnya bisa mengantisipasi adanya pemerintah yang sewenang-wenang.

Salah satu wujud dari Pemerintahan daerah yaitu Pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 bahwa desa diberikan kewenangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, baik asal usul desa, dan adat istiadat desa. Menurut Hoessen dikutip oleh Muluk (2009:5) menjelaskan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Desentralisasi atau otonomi dapat dilakukan dari pusat ke daerah atau daerah ke desa. Dalam konsep desentralisasi atau otonomi banyak sekali hal yang perlu dibagi, salah satunya yaitu tentang keuangan atau bisa disebut dengan desentralisasi fiskal. Dalam desentralisasi fiskal dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat juga paham atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah daerah maupun desa. Menurut Waluyo (2007:218) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang artinya bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban, yang akan dipertanggungjawabkan yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Menurut Waluyo (2007:218) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan. Transparansi dapat diartikan sebagai kejujuran atau keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi ini menjadi salah satu prinsip untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu daerah yang telah menerapkan konsep desentralisasi fiskal di Jawa Timur ialah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan pembagian anggaran dana desa dari Pemerintah pusat yang akan disalurkan kepada seluruh desa. Dari keseluruhan dana yang diterima, 10 persennya akan dialokasikan kepada Pemerintah desa. Seperti ketentuan yang sudah di tulis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 72 ayat 4 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana Perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota yang kemudian dikenal sebagai istilah dana desa.

Pengawasan dalam alokasi dana desa menjadi penting dan berpengaruh pada proses pengalokasian dana, dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang ada pada setiap desa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kecamatan dan Inspektorat, pengawasan tersebut dilakukan secara berkala. Dalam hal pengawasan ini pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tidak terkait, dikarenakan pihak tersebut hanya sebagai fasilitator untuk perencanaan dana desa.

Pada tahun 2015, Pengalokasian Dana desa dari pemerintah pusat untuk Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 59,8 miliar, yang sudah ditransfer ke kas daerah sebesar Rp 47,9 miliar. Namun, baru Rp 16,9 miliar yang disalurkan Pemkab untuk 133 desa dari total 188 desa di Banyuwangi. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), menjelaskan masalah yang dihadapi desa ini antara lain, kesulitan pembuatan SPJ, minim SDM dan belum dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Akmal, 2015)

Tahun 2017, beberapa desa di Banyuwangi sempat terancam akan kehilangan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan bedanya akses internet antara desa dan kota. Ada 179 desa yang bermasalah dalam pelaporan dan pengajuan dana desa. Salah satu pemicunya yaitu banyak perangkat desa yang belum menguasai program *E-Village Budgeting* (Wiryanto, 2017).

Untuk meminimalisir permasalahan dalam proses penganggaran dana desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem *E-Village Budgeting*. *E-Village Budgeting* digunakan sebagai bentuk pengawasan dan pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi pasal 1 ayat 24 bahwa :

“*Electronic Village Budgeting* yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa”

E-Village Budgeting dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa (www.banyuwangikab.go.id). Hasil dari penyusunan anggaran dilaporkan kepada kecamatan dan kepada DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam bentuk laporan anggaran.

Dari hasil pra riset yang telah peneliti lakukan, Menurut Sekretaris Desa Sukojadi seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem *E-Village Budgeting*, agar dapat mempermudah pengelolaan dana desa. *E-Village Budgeting* di Kabupaten Banyuwangi ini sudah berjalan cukup lama, dimulai dari Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *E-Village Budgeting* dikelola oleh Sekretaris dan Bendahara Desa. Salah satu desa yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari.

Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari merupakan salah satu desa yang menerapkan sistem *E-Village Budgeting*, Desa tersebut dianggap kurang mendapat perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam pengawasan pengalokasian dana desa. Saat ini yang menjadi hal utama dalam pembangunan desa yaitu tentang pengelolaan dan pengawasan dana desa, jika sudah benar bisa dipastikan pemerataan pembangunan di desa akan menjadi baik, sebab pembagian anggaran di desa Sukojati ada beberapa indikator. Dengan adanya dana desa yang sudah dialokasikan kepada desa Sukojati ini, belum tentu dapat terbagi rata dalam beberapa indikator pembagian anggaran.

Dana Desa yang didapat akan dibagi dalam 4 kategori yaitu Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan dan Pembinaan. Dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukojati tidak hanya melibatkan perangkat desa saja, namun ada partisipasi masyarakat yang akan dijadikan acuan untuk akuntabilitas dan transparansi alokasi Dana Desa di Desa tersebut. Perencanaan alokasi dana desa diawali dengan adanya Musrenbang, sebab perencanaan ini tidak hanya diusulkan dari perangkat desa namun juga diusulkan dengan masyarakat juga.

Pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan akan banyak masalah yang terjadi, ada beberapa faktor yang menjadi sumber dari masalah tersebut. Dari transparansi pada masyarakat dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Maka dari itu penelitian ini menjadikan Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari ini untuk menjadi objek dari penelitian yang akan membahas tentang *E-Village Budgeting* sebagai sistem yang berguna dalam bentuk pengelolaan dan pengawasan dana desa untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dari latar belakang yang sudah ditulis diatas peneliti telah menentukan tema sebagai bahan skripsi dengan judul **“Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa Melalui *E-Village Budgeting* (Studi Pada Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)”**. Dalam penelitian ini, akan membahas tentang pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Pengelolaan dan Pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting* di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting* di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik, maupun secara praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan literasi bagi peneliti dan juga para pembaca dalam pengembangan ilmu

administrasi publik. Selain itu juga menambah wawasan secara mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberi bantuan dan masukan kepada pemerintah daerah dan juga pihak-pihak yang terkait dalam hal pengelolaan dan pengawasan dana desa agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi desa yang lain dalam hal pengelolaan dan pengawasan dana desa serta untuk menunjang transparansi kegiatan pemerintah desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Masing-masing bab akan memberikan pokok penjelasan yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian yang akan ditulis secara singkat, terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang uraian-uraian singkat dari bab penelitian yang akan ditulis di penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori atau konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini digunakan sebagai acuan pembahasan penelitian dalam membahas dan menganalisis fokus penelitian ini. Ada beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, Manajemen Keuangan Publik, Pengawasan, *E-Government*, dan *E-Village Budgeting*..

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, metode analisis data dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian, menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian setelah menulis penyajian data yang diperoleh akan dianalisa berdasarkan teori yang telah digunakan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari data yang telah diuraikan dalam pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan, dalam bab ini juga ada uraian tentang saran untuk sistem yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dari topik penelitian yang telah ditulis, maka perlu diuraikan beberapa teori sebagai dasar dalam melakukan pembahasan selanjutnya. Beberapa teori yang akan dijelaskan untuk menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Menurut Handayani (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen menyatakan bahwa administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerial work*). Administrasi secara luas menurut Sugandi (2011:3) diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan Administrasi Publik menurut Pasolong (2008:8) menjelaskan bahwa administrasi publik dapat dipahami sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Sjamsiar (2006:116) menjelaskan bahwa proses administrasi publik menekankan pada pengelolaan sumberdaya, politik, dan hukum. Administrasi publik memiliki subjek yang berbeda dalam pemerintahan baik dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Menurut Ibrahim (2008:14) bahwa administrasi publik memiliki ruang lingkup yang meliputi: rumusan tugas pokok, susunan organisasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi material/perengkapan, hubungan kerja, tata kerja, administrasi perkantoran, administrasi perusahaan Negara, dalam segala bidang dan tingkat pemerintahan, keseluruhannya merupakan rangkaian yang mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008:7) mengatakan bahwa administrasi negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara.

Dari penjabaran pengertian administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar lembaga yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan antara lain kepegawaian, administrasi, dan pengorganisasian merupakan salah satu obyek kajian administrasi publik. Dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Dalam Administrasi Publik terdapat Fungsi Administrasi Publik yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi Administrasi Publik

Menurut Tjokroamidjoyo sebagaimana dikutip oleh Tjiptoherijanto dan Manurung (2011:113-114) terdapat 3 (tiga) fungsi utama administrasi publik, yaitu:

- a) **Formulasi Kebijakan**
Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternative, penyusunan program/strategi pengambilan keputusan.
- b) **Pengaturan atau Pengendalian Unsur-Unsur Administrasi**
Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana lain.
- c) **Penggunaan Dinamika Administrasi**

Dinamika administrasi (*the dynamic of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi publik maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Menurut beberapa penjelasan tentang fungsi administrasi tersebut, dapat disimpulkan administrasi publik memiliki fungsi tersendiri dalam pemerintahan. Mulai dari perumusan kebijakan, pengendalian, dan penggunaan dinamika. Salah satu pengendalian dalam administrasi yang akan dikelola yaitu keuangan dan untuk menghindari terjadinya resiko, kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi dilakukan aparatur negara maka perlu proses pengawasan yang bagian dari dinamika administrasi. Dalam hal tersebut, memerlukan Pemerintah Daerah untuk berperan melakukan pengawasan dilingkup Administrasi Publik.

B. Pemerintah Daerah

1. Definisi Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang, Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dipilih oleh masyarakat secara demokratis. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Haris dikutip Nurcholis (2007:100) pemerintah daerah merupakan pelaksana dari pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Lalu menurut Hoessein dikutip oleh Muluk (2009:57) pemerintah lokal merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti:

Pertama, berarti pemerintah lokal yang sering kali dipertukarkan dengan authority yang mengacu pada organ, yakni council dan mayor dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Kedua, mengacu pada pemerintah lokal yang dilakukan pemerintah lokal. Arti kedua lebih mengacu pada fungsi. Ketiga, bermakna daerah otonom tempat dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri.

Dengan adanya Pemerintah Daerah ini dapat membantu tugas dari pemerintah pusat untuk bisa mengatur daerahnya sendiri. Dalam mengatur pemerintahan di Daerah sangat diperlukan Peran Pemerintah Daerah untuk dapat mengawasi seluruh kegiatan yang menyangkut urusan daerahnya sendiri. Agar dalam pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada yang dikatakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* yang dikutip oleh Muluk (2009:111), yaitu:

“pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti”.

Di dalam pandangan ini menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam hal pertahanan, pengadilan, dan polisional. Selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan

lainnya diharapkan masyarakat dapat memenuhinya sendiri dengan cara berkomunikasi dengan sesama. Peran Pemerintah daerah sebagian akan dilimpahkan, dalam pelimpahan wewenang ini terbentuk konsep otonomi desa. Kewenangan Pemerintah Daerah akan dilimpahkan pada Institusi/Kelembagaan Desa yang dipimpin oleh Pemerintah Desa.

C. Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

1. Konsep Otonomi Desa

Menurut Widjadja (2003:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa salah satu bentuk dari adanya otonomi daerah, desa juga merupakan asal mula terciptanya masyarakat politik. Struktur-struktur yang ada di desa ataupun masyarakat adat itu sendiri kini telah menjadi institusi sosial yang sangat tinggi. Desa juga termasuk institusi yang otonom dan sangat mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (2003:166) menjelaskan bahwa pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumpeno (2011:26) menjelaskan, gagasan otonomi desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan pendanaan desa itu ditujukan dalam maksud bagaimana cara desa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana. Menurut Widjaja (2003:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Saragi (2004:32) menjelaskan bahwa otonomi akan tercapai bila partisipasi masyarakat dikembangkan, wujud partisipasi masyarakat haruslah dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, pemanfaatan hasil, dan dalam pengevaluasian.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa otonomi desa ini menjadi sebuah bentuk kemandirian desa, dalam hal mengurus urusan pemerintahannya sendiri, mengelola keuangannya sendiri dan memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri dengan mengelola agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sangat diperlukan perubahan atau perkembangan untuk menerapkan pemerintahan modern, dimana itu akan menunjang kemajuan dalam suatu desa, maka masyarakat desa akan bisa bersaing dengan desa lainnya. Agar dapat menunjukkan bahwa desa tersebut sudah menjadi mandiri. Untuk menjalankan otonomi desa diperlukan adanya partisipasi

masyarakat dan institusi/kelembagaan yang menjadi alat untuk menciptakan kemandirian desa atau otonomi desa.

2. Institusi/Kelembagaan Desa

Ada 3 institusi utama yang menjadi wadah dari dinamika masyarakat pada tingkat desa, yang tercantum pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LKMD, karang taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

Dari beberapa institusi/kelembagaan yang ada pada desa ini akan menjadi salah satu tempat menampung aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan berbagai program. Dari program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya. Institus/Kelembagaan Desa ini akan dipimpin oleh Pemerintah Desa memiliki tingkatan paling kecil untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya sendiri.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa turunan dari pemerintah daerah karena pemerintah desa telah dianggap yang lebih dekat dengan masyarakat. Struktur yang paling kecil ditempati oleh Pemerintah desa, dimana Pemerintah desa juga memiliki tugas yang

harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah karena pemerintah desa membantu tugas pemerintah daerah. Menurut Bintarto dalam Nurcholis (2011:4) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Sedangkan menurut Beratha yang dikutip oleh Nurcholis (2011:4) mengatakan bahwa desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Pelaksanaan tugas atau kewenangan pemerintah desa memiliki aturan yang pedoman dalam melakukannya. Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 24 telah dijelaskan beberapa asas-asas tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu:

- a) Kepastian Hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efektivitas dan efisiensi

- i) Kearifan lokal
- j) Keberagaman, dan
- k) Partisipatif

Sesuai dengan pernyataan-pernyataan diatas telah dijelaskan pengertian pemerintah desa, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa suatu turunan bagian dari pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, mengatur kepentingan masyarakat setempat, mengatur hak tradisional yang ada dalam suatu wilayah. Pemerintah Desa juga harus dapat melakukan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat memahami manajemen keuangan publik untuk pengelolaan keuangan desa.

D. Manajemen Keuangan Publik

1. Manajemen Keuangan Publik

Pengelolaan pada dasarnya termasuk pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang berdasarkan perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. George Terry dalam Hasibuan (2009:2) mendefinisikan bahwa manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman dalam Safroni (2012:44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah diterapkan.

Keuangan publik muncul dari beberapa pendekatan, menurut Domai (2013:38) menyebutkan beberapa pendekatan keuangan yaitu pendekatan berdasarkan kepada sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Sedangkan menurut Suparmoko dalam Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik (2000: 5) keuangan publik yaitu :

Studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Riyanto (2001: 4) menyebutkan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Sedangkan menurut Madiasmo (2004: 2) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Dari beberapa pengertian manajemen keuangan publik diatas dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen keuangan publik ini merupakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan publik dan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dan menggunakan dana untuk aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Dalam Manajemen keuangan publik terdapat Fungsi manajemen keuangan publik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa.

2. Fungsi Manajemen Keuangan Publik

Ada beberapa fungsi manajemen menurut Terry dalam Hasibuan (2009:5) yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan, menetapkan kebijakan, menetapkan rencana penyelesaian, dan untuk mengetahui lebih dulu masalah-masalah yang akan datang agar dapat mengantisipasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian menjelaskan tentang pembagian-pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, agar tidak ada ketimpangan pada satu anggota pekerja dengan anggota lainnya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan untuk melaksanakan rencana kegiatan agar dapat mencapai tujuan. Dimana seluruh anggota pekerja yang terlibat harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan diawal.

4. Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan ini dilakukan untuk membandingkan hasil dengan rencana, menilai hasil dengan standart pelaksanaan, menganjurkan tindakan perbaikan apabila diperlukan, dan memberi pengertian tentang interpretasi yang bertanggung jawab.

Dari fungsi manajemen yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa fungsi diatas akan menjadi bagian dari pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Untuk mengelola keuangan publik, harus bisa memahami prinsip-

prinsip apa saja yang terdapat pada manajemen keuangan publik tersebut. Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mengelola keuangan publik.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Publik

Menurut Waluyo (2007: 218) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Dengan adanya transparansi ini akan memberikan kepercayaan lebih terhadap masyarakat agar masyarakat juga mengerti pemanfaatan keuangan yang ada di daerahnya. Karena seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengalokasiannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang artinya bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPMD terkait dengan nilai kegagalan atau keberhasilan untuk bahan evaluasi tahun berikutnya.

c. *Value for Money*

Prinsip *value for money* artinya bagaimana proses pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Dari beberapa prinsip-prinsip manajemen keuangan publik diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan publik harus mengandung

unsur transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, agar dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuangan Publik ini terdiri dari beberapa jenis, salah satunya merupakan Keuangan Desa yang akan menjadi pokok dalam menjalankan program-program yang ada pada desa.

4. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (pasal 1 ayat 5).
2. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Pelaksanaan dan penatausahaan
 - 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa (Pasal 1 Ayat 6)
 - 4) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 Ayat 9)
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 1 Ayat 10).

Peraturan Bupati Banyuwangi yang telah dijelaskan diatas ini akan menjadi pedoman untuk mengelola keuangan desa yang akan menjadi salah satu untuk pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa ini meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Maka seluruh kegiatan yang ada akan dilakukan secara bertahap, dari pengelolaan sampai pada tahap pengawasan. Dalam proses

pengelolaan keuangan desa ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses pengelolaan keuangan desa.

5. Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan Desa

Suatu pengelolaan keuangan desa akan dipengaruhi beberapa faktor yang akan mempengaruhi berjalannya proses pengelolaan keuangan desa. Sukasmanto dalam Sumpeno (2011: 236) ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan keuangan desa, antara lain :

a. **Transparansi**

Yang dimaksud transparansi disini adalah sebuah keterbukaan pemerintah mengenai informasi pengelolaan keuangan desa dan tentang berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membangun desa.

b. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas ini merupakan tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

c. **Partisipasi Masyarakat**

Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dan berperan dalam proses pembangunan desa.

d. **Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif**

Pemerintah diharapkan dapat melibatkan komponen masyarakat dalam penyusunan APB-Des

- e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Ini tentang kepedulian pemerintah terhadap masalah yang ada pada masyarakat dan apa kebutuhan masyarakat.

- f. Profesional

Dalam hal ini seseorang aparatur harus memiliki keahlian untuk tugasnya masing-masing.

- g. Memperhitungkan sumber daya yang ada

Tentang peduli tentang lingkungan, SDM, dan biaya untuk melakukan kegiatan pembangunan desa.

- h. *Stakeholders*

Keterlibatan pihak luar dalam membantu kegiatan membangun desa.

Beberapa faktor yang ada ini yang akan mempengaruhi proses pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan guna untuk kegiatan pembangunan desa. Diharapkan pemerintah agar terus memerhatikan masyarakat. Sehingga pemerintah desa akan dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin nanti ada pada pengelolaan keuangan desa tersebut. Untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pemerintah desa harus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

E. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Manullang (2006:177) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana

semula. Sedangkan menurut Mockler dalam Yahya (2006: 133) mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Maka dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jika dihubungkan dengan pengawasan pada organisasi sektor publik, dapat dilihat bahwa arti dari pengawasan masih relevan, karena sasaran dalam pengawasan di Pemerintahan salah satunya untuk melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dalam pengawasan terdapat tujuan pengawasan yang akan dicapai dalam proses pengawasan tersebut.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dalam suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan bertujuan agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Menurut Rachman, Arifin Abdul (2001) menjelaskan bahwa maksud dilakukannya pengawasan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Secara lebih konkrit Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:26-27)

merumuskan tujuan pengawasan di lingkungan pemerintah meliputi:

- a. Agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah efektif dan efisien serta ditunjangnya oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
- b. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar ada kelugasan dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dari beberapa tujuan pengawasan.

Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menimbulkan penyimpangan tertentu. Pengawasan tidak dilakukan dengan cara semena-mena, terdapat asas-asas pengawasan yang dipahami dan dilakukan.

3. Asas-Asas Pengawasan

Harold dan O'Donnel dalam Hasibuan (2006) mengemukakan bahwa asas-asas pengawasan yaitu:

- a. Asas tercapainya tujuan

Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.

b. Asas efisiensi pengawasan

Pengawasan itu efisien, dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.

c. Informasi setiap manajer

Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.

d. Asas standart

Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standart yang tepat yang digunakan sebagai acuan dari pelaksanaan dan tujuan yang dicapai.

e. Asas strategi

Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam organisasi

f. Asas pengecualian

Pengecualian ini bisa terjadi karena keadaan/situasi tertentu.

g. Asas fleksibel

Pengawasan harus bisa untuk melewati kegagalan pelaksanaan rencana

h. Asas peninjauan kembali

Sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan

i. Asas tindakan

Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 , yaitu pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah berpedoman pada norma:

- a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

Dari beberapa asas-asas pengawasan yang harus dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa ada standart atau pedoman untuk melakukan pengawasan agar menjadi lebih efektif dan efesien. Ini dilakukan dalam berbagai jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan itu berbeda-beda, ada beberapa kategori yang menjadikan pengawasan ini terpecah menjadi beberapa jenis.

4. Jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan untuk dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Menurut Hamidi dan Lutfi (2011:51-55) macam ruang lingkup pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Pengawasan dari Segi Institusi (Lembaga)

Ada dua macam pengawasan pada segi ini, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- a. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan didalam organisasi pemerintah. Adapun aparat yang bergabung di pengawasan intern ini, yaitu :

- Inspektorat Jenderal Departemen (ITJEN)
 - Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
 - Inspektorat Provinsi
 - Inspektorat Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan dari luar organisasi. Adapun aparat yang bergabung di pengawasan eksternal ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Pengawasan dari Segi Substansi atau Objek yang diawasi.
- Pengawasan dari segi ini ada pengawasan yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- a. Pengawasan Langsung
- Pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi tempat yang akan diawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap objeknya.
- b. Pengawasan Tidak Langsung
- Pengawasan yang dilakukan dengan tidak mendatangi tempat atau objek yang akan diawasi.
3. Pengawasan dari Segi Waktu
- Pengawasan dari segi waktu ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. pengawasan ini berarti bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

b. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan sesudah pelaksanaan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dari beberapa jenis-jenis pengawasan yang ada ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya ada pengawasan dari dalam saja, maka juga diperlukan pengawasan dari luar juga. Untuk menjalankan pengawasan, akan ada proses pengawasan didalamnya yang akan menjadi bagian dari pengawasan. Dari proses pengawasan ini juga terdapat beberapa proses pengawasan.

5. Proses pengawasan

Menurut pendapat Gary Dessler dalam Sukanto (1986:95) menyebutkan bahwa proses pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah, sebagai berikut:

- a. Menetapkan beberapa standart atau sasaran
- b. Mengukur/membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standart
- c. Identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif.

Sedangkan menurut Winardi dalam Sujanto (1986:96) proses pengawasan terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu:

- a. Menetapkan standart atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai

- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standart dan menetapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan)
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif

Langkah-langkah proses pengawasan yang sudah ada diatas dibuat agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Jadi tidak ada penyimpangan dalam melaksanakan pengawasan. Saat ini pekermbangan zaman sudah sangat pesat dengan adanya teknologi yang sangat mendukung juga. Proses Pengawasan saat ini juga telah didukung dengan teknologi berbasis elektronik yang berbentuk *E-Government*.

F. *Elektronic Government*

1. Definisi *E-Government*

Bank Dunia (*World Bank*) dalam buku *E-Government*, mengartikan *E-Government* yaitu :

“*E-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area networks, the internet, and mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan”. (dalam Indrajit, 2006:2)

Terdapat pendapat lain dari Clay G. Wescott (Pejabat Senior *Asian Development Bank*) dalam buku *E-Government*, mengartikan *E-Government* yaitu:

“ Pada intinya, *E-Government* adalah penggunaan *information and communication technology (ICT)* untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan ICT ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti *G2C (government to citizen), G2B (government to business) dan G2G (inter – agency relationship)*”. (dalam Indrajit, 2006:4)

Menurut Priyanto dalam Akadun (2009:131) definisi dari *E-Government* adalah berbicara tentang sistem informasi pemerintah berbasis komputer. Perkembangan *E-Government* juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi informasi. *E-Government* memiliki prinsip-prinsip yang akan menjadi acuan untuk menerapkannya. Ada beberapa prinsip utama yang dimiliki oleh *E-Government*.

2. Prinsip-Prinsip *E-Government*

Menurut Indrajit (2006:5) ada 4 (empat) prinsip utama yang dimiliki oleh *E-Government* ini, yaitu:

Prinsip Pertama: Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.

Prinsip Kedua: Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif.

Prinsip Ketiga: Berikan penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.

Prinsip Keempat: Tekankan pada pencapaian efisiensi. Dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dari implementasi jalur modern terkait.

Dari penjabaran tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Elektronik, pemerintah perlu untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang disebutkan di atas merupakan prinsip dasar bagi penerapan *E-Government* di Indonesia. *E-Government* harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di dalam lingkungan yang kompetitif dan harus terus menciptakan inovasi untuk mencapai efisiensi. Agar *E-Government* bisa berkembang menjadi lebih baik dan sukses, diperlukan adanya elemen sukses

pengembangan *E-Government* yang akan menjadi bagian dalam proses berjalannya *E-Government*.

3. Elemen Sukses Pengembangan *E-Government*

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*.

Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan.

Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan didalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*).

Dari beberapa elemen sukses pengembangan *E-Government* harus dipenuhi, karena sangat berpengaruh dalam berjalannya proses kerja *E-Government*. Seluruh elemen saling berkaitan dan aspek masing-masing. *E-Government* memiliki beberapa bentuk sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Salah satunya untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa akan menggunakan sistem *E-Village Budgeting* yang merupakan bagian dari *E-Government*.



G. *E-Village Budgeting*

E-Village Budgeting ini bagian dari *E-Government* yang telah diterapkan untuk sistem pengelolaan anggaran dana pada tingkat Desa. Di Indonesia, penyusunan APBD yang dilakukan menggunakan *E-Government* pertama kali diterapkan di Kota Surabaya. Tidak lama setelah itu banyak daerah-daerah yang telah menggunakan sistem ini dan kemudian salah satunya Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem ini bertujuan untuk membuat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan dalam bidang pengelolaan dana desa dan juga untuk menciptakan akuntabilitas untuk para administrator yang memiliki tugas untuk mengelola dana desa agar bisa terbagi rata. Dalam sosialisasi untuk pertama kali muncul sistem *E-Village Budgeting*.



Gambar 2.1 Halaman Depan Sistem Aplikasi *E-Village Budgeting*

Sumber: Manual Ringkas Pengisian *E-Village Budget*

Untuk mengakses sistem ini, pertama-tama setiap individu atau pengguna harus terdaftar, karena setiap pengguna nantinya akan memiliki tugas yang berbeda-beda dapat dilihat dari kewenangannya. Setiap desa, akan memiliki *user* yang

berbeda-beda, jadi tidak semua orang dapat mengakses sistem ini. Sistem ini dibuat dengan jenis web, dimana untuk mengakses sistem ini pengguna dianjurkan untuk masuk terlebih dahulu pada *web browser* lalu dapat memasukkan alamat *web E-VillageBudgeting* itu sendiri.

Didalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi pada pasal 1 ayat 24, telah berbunyi bahwa:

“*Electronic Village Budgeting* yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa”.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan ini bahwa *E-Village Budgeting* sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan pada tingkat desa, guna untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa kepada masyarakat. Sistem ini juga juga menjadi inovasi dalam keterbukaan kepada lembaga pemerintahan yang diawali dari desa, agar dapat memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual dan dapat menjadi lebih efektif dalam pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian akan lebih membantu peneliti dalam memperoleh data yang akan digunakan oleh peneliti. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif akan lebih bisa menjabarkan dan menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini dengan lebih sistematis dan akurat.

Menurut Gorman dan Clayton dalam Santana (2007:28) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadiannya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat, dan melibatkan perspektif yang partisipatif dalam berbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini akan dapat menggambarkan data yang dibutuhkan dan akan ditulis dalam karya ilmiah ini oleh penulis. Penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang sistem *E-Village Budgeting* sebagai sarana untuk pengelolaan dana desa ini akan digambarkan secara deskriptif dari hasil penelitian ini dan data yang ada dalam bentuk kalimat atau lisan tidak diuji dengan statistik.

B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian yang menjadi hal terpenting adalah fokus penelitian, karena ini yang akan menjadi batasan dalam kegiatan penulisan. Dalam hal yang sama Moleong (2012) menjelaskan fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mendeskripsikan dan mengkaji masalah yang diteliti dengan tujuan membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat dan obyek akan menjadi layak untuk diteliti dan secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk. Pada dasarnya, penelitian kualitatif berdasarkan persepsi peneliti terhadap masalah yang bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian pada tulisan ini akan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, adapun fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengelolaan dana desa melalui *E-Village Budgeting*, berdasarkan teori Fungsi Manajemen menurut Terry dalam Hasibuan (2009:5), dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengawasan

2. Pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting*, berdasarkan teori Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Daerah menurut Waluyo (2007:218) , dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Transparan
 - b. Akuntabel
 - c. *Value For Money*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah tempat peneliti mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya tentang obyek yang akan diteliti. Maka dengan hal ini, peneliti menentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
2. Kantor Kepala Desa Sukojadi

Untuk menetapkan Lokasi penelitian yang ada ini, peneliti memiliki alasan mengapa memilih lokasi penelitian di 2 (dua) tempat tersebut. Yang pertama yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi, karena Dinas yang terkait merupakan fasilitator dalam pelaksanaan *E-Village Budgeting* di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua yaitu Kantor Kepala Desa Sukojadi atau Desa Sukojadi, Karena desa tersebut merupakan salah satu desa percontohan di Kabupaten Banyuwangi dalam penerapan *E-Village Budgeting* untuk mengelola dana desa.

D. Sumber Data Penelitian

Pada setiap penelitian pasti perlu sumber data yang akurat agar data tersebut menjadi benar dan terpercaya. Adapun data yang ada pada penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil yang terjadi langsung pada lapangan, yang akan dipilih untuk melakukan proses wawancara dengan informan, yaitu :

- a. Sekretaris Kantor Kepala Desa Sukojadi, Bapak Wawan Ihwanto
- b. Bendahara Kantor Kepala Desa Sukojadi, Bapak Muhammad Aris
- c. Kabid Pemerintah Desa DPMD, Bu Ida
- d. Ahli EVB DPMD, Mas Andi
- e. RT/RW Desa Sukojadi, Bapak Ahmad
- f. Masyarakat Desa Sukojadi, Bapak Saiful

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini data yang diperoleh bukan dari sumber langsung namun dari pihak yang terkait. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. sumber data sekunder ini akan menjadi data pendukung untuk sumber data primer yang sudah diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian, sumber data sekunder berbentuk sumber literatur tertulis yang berupa buku, berita, ataupun arsip.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diperlukan agar data terkumpul tepat sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga mudah untuk mendapatkan data. Oleh karena itu didalam penelitian diperlukan untuk menentukan teknik pengumpulan data. Sugiyono (2015:225) mengungkapkan bahwa secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian data sebagai berikut:

1. Observasi

Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2010:131) mengungkapkan pengertian observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta mereka perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Pada teknik observasi ini, peneliti mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti. Peneliti akan melihat langsung keadaan saat ini yang ada di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari untuk melihat tentang *E-Village Budgeting* yang berjalan disana. Maka peneliti akan mendapatkan data dan informasi secara langsung dari hasil penelitian. Penelitian terkait pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati tersebut akan dilakukan observasi lebih banyak mengarah pada pengamatan langsung di lapangan yang berpusat di Desa Sukojati. Peneliti juga menggunakan sisi teoritis sebagai penunjang observasi selama di lapangan. Teknik observasi dapat dilakukan bersamaan pada saat wawancara, pengambilan dokumentasi dan survei lapangan.

1. Wawancara

Menurut Mulyana (2004) wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informan dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara menurut Indrianto dan Supomo (2011:157) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara salah satu proses untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung.

Peneliti disini akan menggunakan wawancara yang terstruktur, dimana peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, dengan menyiapkan alat bantu yang berbentuk *recorder* untuk membantu merekam hasil wawancara.

2. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi akan menjadi penguat untuk data dan informasi yang telah diperoleh peneliti. Dokumentasi didapat dari sumber sekunder yang berupa arsip ataupun literatur. Teknik dokumentasi bermacam-macam bentuknya, ada foto, notulensi rapat, ataupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006) dalam bukunya dasar-dasar evaluasi pendidikan, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dapat mempermudah peneliti melakukan penelitian. Pendapat lain menurut Arikunto (2002:136) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif peneliti berfungsi menetapkan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data serta menafsirkan dan membuat kesimpulan.

2. Alat Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan alat yang dapat dijadikan penunjang dalam proses penelitian salah satunya alat dokumentasi yang bisa berupa kamera yang digunakan untuk mendokumentasi berupa foto, atau video. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam (recorder) yang digunakan untuk merekam percakapan selama proses wawancara.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti sebelum peneliti melakukan wawancara dengan informan, hal ini diperlukan agar peneliti dapat mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan penting yang akan diajukan selama proses wawancara.

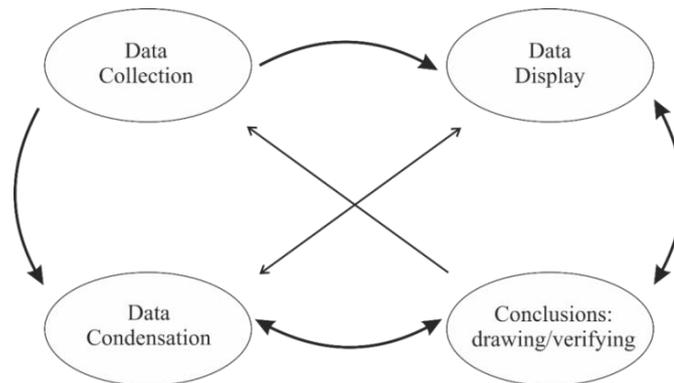
4. Catatan Lapang

Catatan lapang merupakan tulisan hasil olahan peneliti sendiri tentang apa yang ditemukan di lapangan yang merupakan informasi yang dapat dijadikan data.

3. Analisis Data

Moleong (2014:280) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:245) menjelaskan bahwa kegiatan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah dari awal penelitian, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian. Sedangkan menurut Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dilakukan secara terus menerus dan berulang sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

Pada penelitian kualitatif hasil yang akan diperoleh akan berupa uraian kata-kata tertulis yang telah di dapat oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari 3 (tiga) alur, yakni sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014)

1. *Data Condensation*

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui sistem *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi serta faktor penghambat yang dihadapi selama lapangan secara berulang-ulang, sehingga data yang terkumpul lengkap dan maksimal.

2. *Data Display*

Data yang telah dipilah dan dikelompokkan kemudian disajikan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data dan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, peneliti menelaah data yang telah diperoleh. Keseluruhan data yang diperoleh di situs penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut kemudian diproses dengan pemilahan, pemusatan, penyederhanaan data sesuai

dengan masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Data yang telah dipilih sesuai dengan fokus tersebut selanjutnya akan diringkas menjadi suatu rangkuman, tabel, dan gambar. Penyajian data terkait pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting* di Desa Sukojati yang telah diperoleh peneliti dilapangan dan telah sesuai dengan fokus penelitian tersebut akan diikuti dengan analisis data, lalu selanjutnya data terkait permasalahan atau fokus penelitian akan dibandingkan dengan teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian.

3. *Conclusions: drawing/verifying*

Pada bagian ini peneliti dapat meninjau ulang data yang telah ada. Setelah peneliti menemukan makna dari permasalahan dalam penelitian tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sehingga seluruh hasil penelitian dapat menjadi lebih fokus. Kesimpulan yaitu hasil analisis data yang telah dikaitkan dengan teori maupun regulasi yang ada. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam kegiatan analisis data.

4. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam Setyobudi (2015: 60-61) menguraikan uji keabsahan data dalam penelitian Kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data atau hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member *check*.

2. Uji Transferability

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

3. Uji Dependability

Dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.

4. Uji Konfirmability

Penguji Konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terkait penelitian *E-Village Budgeting* sebagai pengelolaan dan pengawasan dana desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa melalui *E-Village Budgeting* di Pemerintahan Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

- a. Perencanaan

Pemerintah Desa Sukojati telah melakukan perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi dan dapat dikatakan cukup baik.

- b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang ada di Desa Sukojati sudah jelas dan tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab. Maka pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Sukojati akan berjalan dengan lancar.

- c. Pelaksanaan

Dana Desa yang telah diperoleh akan diprioritaskan pemanfaatannya untuk membiayai pelaksanaan program yang ada pada desa Sukojati di bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Pengawasan

Proses pertanggungjawaban dan pengawasan biasanya dilakukan dengan cara penyerahan laporan hasil kegiatan yang akan diperiksa. Dengan adanya pengawasan, akan dapat mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan dana desa, apakah sudah berhasil atau tidak berhasil.

2. Pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting* di Pemerintah Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

a. Transparansi

Pemerintah Desa Sukojadi telah berinisiatif dan berusaha tetapi tidak memberikan transparansi secara baik, hanya dilakukan secara umum tidak secara detail. Transparansi dilakukan dengan cara sosialisasi dan memasang banner pemanfaatan APBDesa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukojadi kurang baik, karena Pemerintah Desa Sukojadi menerapkan akuntabilitas hanya ketika terjadi masalah saja, tidak ada perencanaan pencegahan sebelumnya.

c. *Value For Money*

Pemerintah Desa melakukan perencanaan pembagian dana desa dengan melihat sisi ekonomis, efektif, dan efisien. Pemerintah Desa Sukojadi sudah cukup baik untuk pembagian atau pemanfaatan dana desa yang telah diperoleh, karena telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa melalui *E-Village Budgeting* pada Desa Sukojati yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka peneliti akan memberikan saran kepada pihak yang terkait dengan aplikasi *E-Village Budgeting* yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus lebih detail untuk menyampaikan transparansi pemanfaatan anggaran. Seperti menyantumkan pemanfaatan dana desa dalam Banner yang dipasang dengan menyertakan nominal yang rinci. Jadi, transparansi yang dilakukan tidak hanya secara umum.
2. Pemerintah Desa seharusnya tidak hanya menerapkan akuntabilitas jika telah terjadi masalah saja, namun Pemerintah Desa juga harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi masalah. Seperti melakukan tindakan preventif dalam perencanaan diawal.
3. Dalam pelaksanaan *E-Village Budgeting* memerlukan evaluasi sistem. Evaluasi sistem ini dapat dilakukan oleh setiap desa yang lalu diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk memantau sejauh mana perkembangan aplikasi *E-Village Budgeting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Akmal, Putri. 2015. *Anggaran Desa di Banyuwangi Minim Pencairan*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3006199/anggaran-dana-desa-di-banyuwangi-minim-pencairan>. Diakses 28 November 2018
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bima Aksara
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Domai, Tjahjanulin. 2013. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gorman, G.E. & Pater Clyton. 1997. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. (Septiawan Santana Kurnia. Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hamidi, Jazim, Mustafa Luthfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selatan: Salemba Humanika
- Humas, Protokol. 2016. 186 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E-Village Budgeting. Diakses 10 Oktober 2018 dari <http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html>
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT. Rafika Aditama

- Indrajit, Richardus Eko (2006). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Madiasmo. 2004. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3:2
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ke tujuh*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miles, B Mathew, A. Michael Huberman and Johanny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. Thousand Oaks CA: Sage Publication
- Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Method Sourcebook. United States of America*. Arizona State University
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITSPress
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- _____. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pasolong, Harbard. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Rachman, Abdul Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFPE Yogyakarta
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Setyobudi, Aris. 2015. Skripsi: *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern (skripsi)*. FIA: Univ. Brawijaya
- Siswanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sjamsudin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Sofa Mandiri dan Indonesia Print Malang
- Sugandi, Yogi S. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Bandung: Bina Budaya
- Soleh, Habib dan Rochmansjah, Heru. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5*. BPFPE, Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, Pijono dan Manurung Mandala. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Indonesian Press
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 4 Tentang Desa

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Victor, M. Situmoreng, dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wirianto, Budi. 2017. Di Banyuwangi Seratusan Desa Terancam Kehilangan Dana Desa..[http://www.balipost.com/news/2017/03/31/3948/Di.Banyuwangi.Seratusan.Des.Terancam.Kehilangan.Dana.Des.html](http://www.balipost.com/news/2017/03/31/3948/Di.Banyuwangi.Seratusan.Desa.Terancam.Kehilangan.Dana.Des.html) diakses 28 November 2018

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Ilmu